

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada prinsipnya memuat ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai (*outcome*) dari tiap program sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Muatan informasi tentang realisasi kinerja, disajikan secara bersanding dengan kinerja yang direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025.

Ketentuan pelaporan Akuntabilitas Pemerintah mengharuskan kepada setiap pimpinan Perangkat Daerah (PD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana investasi dari pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 ini disusun sebagai perwujudan tujuan organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun 2025, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang dihadapi untuk dijadikan bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun perbaikan untuk penyempurnaan senantiasa diupayakan.

DAFTAR ISI

SAMPUL LKJIP	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PERNYATAAN REVIU	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. LATAR BELAKANG	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. STRUKTUR ORGANISASI	9
D. ISU-ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD	13
B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI	14
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN	17
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2025)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	22
BAB IV PENUTUP	42
A. TINJAUAN UMUM	42
B. TINJAUAN KHUSUS	42
C. SARAN	43

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini. Kami merekomendasikan agar kedepannya terdapat sinkronisasi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024-2026.

Bali, 3 Pebruari 2026

Ketua Tim Evaluasi AKIP Internal
Inspektorat Daerah Provinsi Bali



DR. I Dewa Komang Ary Gunartha, ST.,M.Si

NIP. 19781015 199903 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional yang secara implicit melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang merupakan bagian integral dari system penyelenggaraan pemerintahan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25) mengatur Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali memiliki fungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai acuan untuk mewujudkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah menetapkan tujuan penyelenggaraan organisasi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas kemudian dijabarkan secara spesifik dalam sasaran-sasaran, serta ditetapkan pada cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan merupakan target tahunan.

Dalam melaksanakan Kegiatan dan Program di tahun 2025 terdapat kendala seperti belum memadainya sarana dan prasarana gedung kantor untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan operasional kantor.

Untuk mengatasi kendala tersebut beberapa langkah antisipatif yang ditempuh antara lain : memaksimalkan ruangan yang ada guna dapat dipakai untuk kegiatan kantor.

Dari uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja serta analisa akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa : kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali pada prinsipnya telah mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya reformasi birokrasi pemerintah merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui langkah-langkah strategis yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistemik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Amanat reformasi perlu segera diwujudkan melalui pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas birokrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta peningkatan disiplin dan etos kerja aparatur.

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah yang dicanangkan adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berupaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Output dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja dan bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, walaupun uang atau anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa *output* maupun *outcome*.

Sehubungan dengan itu, maka sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dibangun sebagai upaya untuk mewujudkan *Good Governance* perlu terus dikembangkan dalam sebuah informasi kinerja yang terintegrasi dengan

sistem penganggaran dan pelaporan sebagai manifestasi dari diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Bali yang mengemban tugas Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan maupun perubahan yang terjadi di era reformasi ini.

Untuk memenuhi ketentuan pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah maka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut harus pula disampaikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Bali mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk dapat melaksanakan tugas seperti tersebut diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :

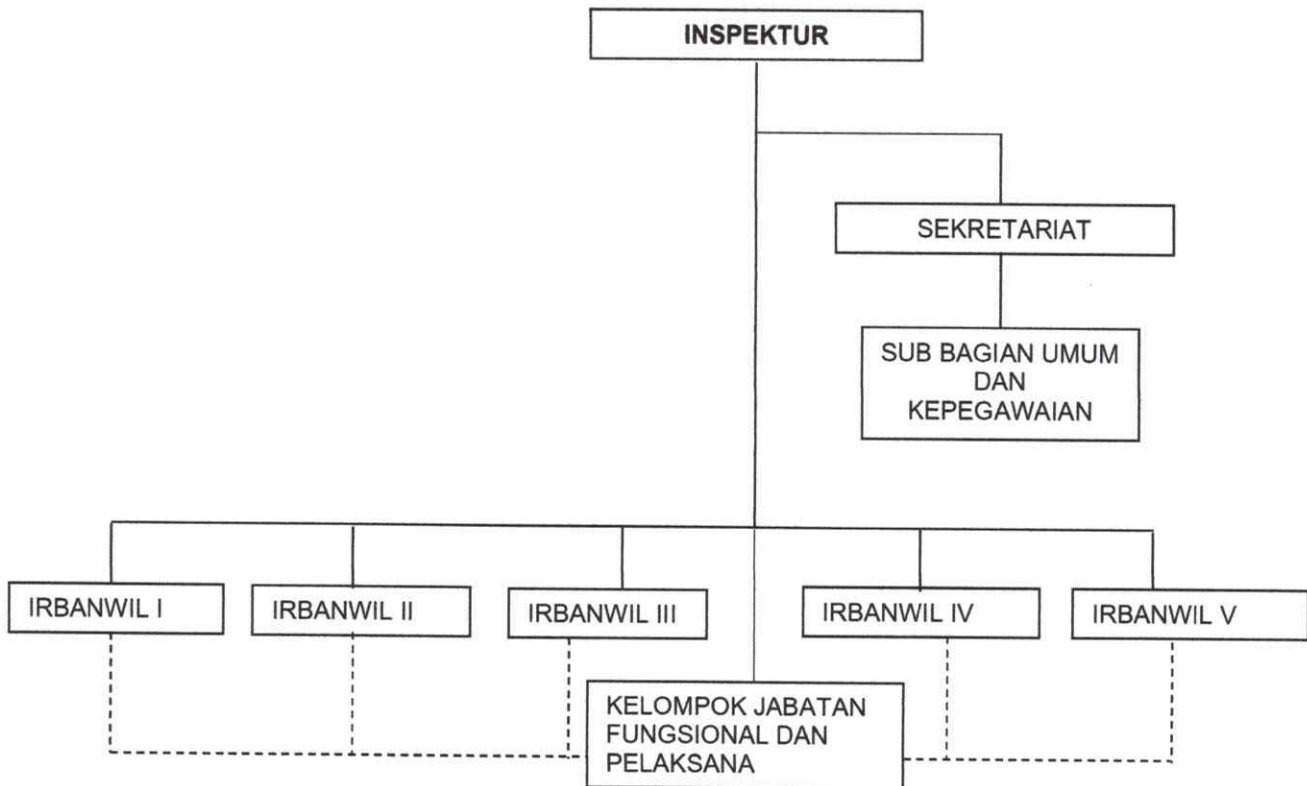
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengenai Uraian Tugas Inspektorat Daerah Secara Detail Dijabarkan Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tertata dalam susunan sebagai berikut :



Keterangan :

————— adalah garis Perintah

----- adalah garis koordinasi

D. ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat Daerah adalah :

1. Tuntutan memperoleh Opini BPK (WTP) yang lebih berkualitas dan dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Penerapan SPIP/MRI di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang lebih efektif;
3. Tuntutan penguatan Kapabilitas APIP yang lebih optimal
4. Tuntutan memberikan Pelayanan Publik yang lebih Prima;

5. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP), Stranas PK dan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Struktur organisasi dan uraian tugas Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali.
- 2) Kerjasama tim pada bidang pengawasan cukup baik dan sangat mendukung di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
- 3) Adanya pedoman dan SOP dalam melakukan pengawasan.
- 4) Adanya program pemeriksaan yang jelas yang ditetapkan setiap tahun berupa Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- 5) Sarana dan prasarana kantor berupa meja kerja, mebeleur, dan sarana mobilitas relatif cukup memadai.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- 1) Kompetensi Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan (P2UPD) relatif kurang memadai.
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat teknis pengawasan secara berjenjang dan periodik yang masih kurang
- 3) Disiplin dan kinerja SDM belum maksimal.
- 4) Alat bantu pemeriksaan terbatas.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memberantas KKN.
- 2) Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
- 3) Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 4) Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.
- b. Tantangan (*Threats*)
- 1) Semakin kuatnya peran aparat pengawasan eksternal pemerintah.
 - 2) Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - 3) Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-undangan belum memadai.
 - 4) Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih relatif rendah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menetapkan faktor penentu keberhasilan. Penetapan faktor penentu keberhasilan didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan penilaian dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor-faktor Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor lingkungan eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) dan Tantangan (*Threats*) yang ada.

Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factor*) ini merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Faktor-faktor keberhasilan ini berfungsi untuk memfokuskan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka pencapaian tugas dan fungsinya secara ekonomis, efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan hasil pengawasan sebagai alat kontrol penyelenggara pemerintahan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang, dimana hasil pengawasan merupakan masukan penting dalam penyusunan rencana. Demikian juga masyarakat membutuhkan hasil pengawasan dari aparat pengawasan sebagai bahan pengawasan

- (pengawasan masyarakat) karena penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam kebijakan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyusunan perencanaan, saat pelaksanaan kegiatan dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 3. Memiliki program pemeriksaan, pendidikan dan latihan serta pengembangan metode kerja. Guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan telah disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk mensinkronkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Disamping itu pula, perlu dilakukan peningkatan kompetensi/kemampuan aparat pengawas dan pengembangan metode kerja.
 4. Tersedianya aparat pengawas yang memadai dan memiliki wawasan yang luas serta profesional. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sudah memiliki aparat pengawas baik Jabatan Fungsional Auditor maupun Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah sesuai kebutuhan.
 5. Dukungan anggaran Operasional Pengawasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang relatif cukup memadai.
 6. Sarana dan prasarana pengawasan yang cukup memadai, walaupun jenis dan kualitasnya perlu ditingkatkan terutama alat bantu pengawasan.
 7. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan/APBD yang memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku *stakeholder*.
 8. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal dan eksternal. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan opini WTP dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
 9. Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. KAITAN RENSTRA DENGAN RPD

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (Core Business) adalah membantu Gubernur dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah (dalam mengawal/menjaga tata kelola pemerintah daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan bersih).

Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan Tujuan yaitu: **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"** dengan indikator *Indeks Reformasi Birokrasi*, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Bali, sekaligus menetapkan Tujuan tersebut menjadi tujuan yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali periode Tahun 2024-2026.

B. RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BALI

Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai lembaga pengawas fungsional Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada era reformasi ini merupakan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah berpegang teguh pada prinsip independensi, obyektivitas, transparansi serta menjunjung tinggi etika dan moral sehingga dengan demikian diharapkan aparat pengawasan dapat bertindak obyektif, transparan dan adil. Untuk itu harus didukung oleh manusia yang profesional dalam bidang tugasnya.

Guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa maka terlebih dahulu harus diciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah transparan dan akuntabel. Untuk itu manajemen pemerintah harus mengacu pada prinsip keterbukaan. Hasil pengawasan dapat diperuntukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan mengacu pada hasil kerja (Kinerja) yang terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan mendatang mengutamakan prinsip independensi etika dan moral, berlaku obyektif, berperilaku baik dan bersifat jujur.

Disamping melakukan pengawasan, aparat pengawas intern pemerintah juga melaksanakan pembinaan, sehingga aparat pengawasan intern berperan sebagai mitra bagi perangkat daerah lainnya. Untuk dapat mengemban tugas pembinaan sekaligus pengawasan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan secara matang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Bali, maka **Tujuan** yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”***.

2. Sasaran

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan Program/ Kegiatan pemerintah sebagai fokus utama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran strategis** pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan
- b. Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.
- d. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.
- e. Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Terwujudnya Penguatan APIP Provinsi Bali.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Bali, telah ditetapkan sasaran kinerja yaitu tujuan dan sasaran strategis organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Bali.

Maka untuk mengukur keberhasilan capaian hasil (*Outcome*) dari masing-masing sasaran strategis di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari masing-masing sasaran tersebut yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Bali dan RPJMD Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.
- c. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WTP).

d. Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali.

e. Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali.

Keselarasan antara sasaran strategis dengan indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel berikut :

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Formulasi perhitungan: (jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus yang masuk) x 100%	Irbawil dan Sekretariat	Laporan hasil pemeriksaan kasus	1. Pemeriksaan kasus khusus dan tujuan tertentu 2. Penanganan WBS 3. Pelaksanaan Unit Saber Pungli
2 Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Standar penilaian dari BPKP	Irbawil dan Sekretariat	Laporan Hasil Pembinaan dan Laporan Hasil Evaluasi	1. Penyelenggaraan SPIP
3 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	WTP	Irbawil Sekretaris	LHP BPK Laporan Hasil Monev	1. Pengamatan dan pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah 2. Pemeriksaan Reguler 3. Pengawasan Dana Desa 4. Pengawasan dana BOS 5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah
4 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil	Formulasi perhitungan:	Sekretariat	Hasil Pemutakhiran data TLHP	1. Pemantauan tindak lanjut dan

pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	(Jumlah tindak lanjut dibagi jumlah rekomendasi) x 100%			pemutakhiran data hasil pemeriksaan internal dan eksternal
5 Meningkatkan upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	Persentase Capaian Penilaian MCP Pemerintah Provinsi Bali	Irbanwil	OPD leading 7 Area Intervensi dalam aplikasi jaga.id	1. Evaluasi dan revaluasi tindak lanjut MCP KORSUPGAH KPK
6 Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Standar Quality Assurance BPKP	Sekretariat	Apilasi PK APIP BPKP	1. Peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah 2. Penilaian PAK Jafung

D. PERENCANAAN KINERJA DALAM 3 (Tiga) TAHUN

Rencana Kinerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 3 (tiga) Tahun anggaran dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026, dapat diuraikan dalam table sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGER PER TAHUN		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai hasil survei	90	90	95
2.	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Hasil Penilaian BPKP	Level III	Level III	Level IV
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil	Persentase %	100%	100%	100%

	pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal				
5.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Terintegrasi	Nilai Capaian	99,00	99,00	99,20
6.	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Daerah Provinsi Bali	Level	Level III	Level III	Level IV

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2025)

Inspektorat Daerah Provinsi Bali Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja tentang target kinerja tahunan yang ingin dicapai pada tahun 2025 sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana table berikut:

NO	SASARAN KINERJA STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	90%
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	LEVEL III
3	Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah provinsi bali yang baik sesuai SAP	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan external yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%

5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	99,00
6	Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali	LEVEL III

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 31.979.995.651,-	APBD
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.579.009.588,-	APBD
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.105.243.004,-	APBD
JUMLAH :		Rp. 35.944.174.832,-	APBD

Melihat table diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tercapainya sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat.
Cara pencapaian Sasaran "**Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan**", Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan :
Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan anggaran **Rp. 514.691.215,-**
2. Tercapainya sasaran Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali.
Cara pencapaian Sasaran "**Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali**", dilaksanakan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal dengan anggaran **Rp.283.700.300,-**
3. Tercapainya sasaran Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Cara pencapaian Sasaran **“Terwujudnya Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP”**, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 92.116.810,-
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 159.626.210,-
 - c. Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran Rp.48.013.500,-
 - d. Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran Rp.142.605.705,-
 - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.547.158.610,-
 - f. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.211.249.315,-
 - g. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran Rp.141.882.800,-
 - h. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran Rp.77.916.400,-
4. Tercapainya sasaran Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu, dapat diukur dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu.

Cara pencapaian Sasaran **“Terwujudnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindak lanjuti tepat waktu”** Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program penyelenggaraan pengawasan dengan sub kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran Rp.196.177.910,-

2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp.50.875.110,-
5. Tercapainya sasaran Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
- Cara pencapaian Sasaran "**Terwujudnya penguatan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Provinsi Bali**", Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan sub kegiatan:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran Rp.299.286.015,-
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan anggaran Rp.1.291.866.617,-
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.18.521.800,-
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp.24.137.200,-
 - e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp.26.039.950.471,-
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 49.999.400,-
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 99.997.800,-
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 158.109.394,-
 - i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 40.070.300,-
 - j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran Rp. 44.140.800,-
 - k. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp. 39.960.000,-
 - l. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp.647.514.000,-

- m. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 1.694.023.740,-
 - n. Penyedia Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 5.092.900,-
 - o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 318.500.000,-
 - p. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 309.560.560,-
 - q. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 1.617,453.428,-
 - r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 341.752.212,-
 - s. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp.155.155.410,-
6. Tercapainya sasaran Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali, dapat diukur dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali.
- Cara pencapaian sasaran“ **Meningkatnya upaya pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali**”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran Rp. 283.068.900,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam upaya memberi pertanggung jawaban terhadap tingkat pencapaian kinerja, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025.

Pertanggungjawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme dan fungsi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Bali tahun 2025 dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2025, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	Nilai Indeks	90	90

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target	Realisasi
	kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	penyelesaian pengaduan masyarakat	hasil Survei		
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level	Level III	Level III
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	4.1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal	%	100	98,45
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	5.1 Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	%	99,00	99,00
6	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	6.1 Level Kapabilitas APIP Daerah Prov. Bali	Leve III	Level III	Level III

Sesuai dengan table diatas dapat dijelaskan bahwa target yang direncanakan dalam tahun 2025 untuk masing-masing sasaran strategis dengan indikator pengukurannya jika dibandingkan dengan realisasinya sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan, namun masih ada sasaran yang belum mencapai target yaitu *Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal* disebabkan adanya beberapa temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjutnya.

Dengan demikian hasil (*outcome*) yang diharapkan dalam tahun yang bersangkutan (tahun 2025) sebagian besar telah dapat dicapai atau diwujudkan.

2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari Indikator kinerja utama tahun 2025 telah mencapai target.

Rincian perbandingan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama tahun 2024 dan tahun 2025, sebagai berikut :

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	100	90	90	90
2.	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III	Level III	Level III
3.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	4.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	99,86	100	98,45	98,45
5.	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	5.1 Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level III	Level III	Level III	Level III
6.	Terwujudnya SAKIP yang baik pada Pemerintah Provinsi Bali	6.1 Hasil penilaian evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Bali oleh Kementerian PAN dan RB	BB	BB	BB	BB

No	Sasaran Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	IKU	CAPAIAN TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
7.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	7.1 Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	-	99,00	99,00	99,00

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2025 telah sesuai dengan target kinerja yang ditargetkan dalam Renstra, namun masih ada sasaran yang belum mencapai target yaitu *Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal* disebabkan adanya beberapa temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjutnya. sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

NO	SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2025		TARGET RENSTRA TAHUN 2025	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.	1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat	Nilai Indeks hasil surve	90	97,6	90	97,6
2	Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.	2.1 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Nilai Level	Level III	Level III	Level III	Level III
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset Pemerintah	3.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LHP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

	Provinsi Bali yang baik sesuai SAP							
4	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	4.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal	%	100	98,45	100	98,45
5	Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	5.1	Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali	%	99,00	99,00	99,00	99,00
6	Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali	6.1	Level Kapabilitas APIP Daerah Prov. Bali	Nilai Level	Level III	Level III	Level III	Level III

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2025 telah dapat dicapai. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala atau pun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah :

1. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas internal pemerintah yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Bali.
2. Kurangnya kemauan aparatur pemerintah pada Perangkat Daerah untuk memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya komitmen Pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan kinerja.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah :

1. Memperkuat SDM dengan meningkatkan kompetensi aparatur pengawas dengan menyelenggarakan pendidikan.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah melalui pembinaan dan pengawasan, reviu, evaluasi dan asistensi.
3. Meningkatkan dan mengingatkan komitmen pimpinan perangkat daerah melalui himbauan, arahan dan edaran Pimpinan perangkat daerah.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip :

- a. Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. responsif; dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. efisien; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. partisipatif; merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
- g. terukur; adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan.

Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut, dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Inspektorat Daerah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

a. *Sasaran strategis 1; Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan.*

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat*, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	<i>Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat</i>	90	90

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat* tahun 2025 telah mencapai target . Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 90 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 90.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran *“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di bidang pengawasan”*, dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025, dengan sub kegiatan:

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu jumlah anggaran :

- Anggaran : Rp. 514.691.215
- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 504.058.4675 (97,93 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 10.632.750 (2,07 %)**

b. Sasaran strategis 2; Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali*, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Nilai maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Bali	Level III	Level III

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja* prosentase penurunan temuan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tahun 2025. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan level III telah dapat dicapai dengan tingkat capaian level III.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran "**Terwujudnya SPIP yang baik di Pemerintah Provinsi Bali,**", dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Sub kegiatan **Kerjasama Pengawasan Internal, jumlah anggaran Rp. 283.700.300**

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk memacu dan membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu menyusun suatu sistem untuk melakukan pengendalian terhadap kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025.

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 35.944.174.832
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 34.015.253.758 (94,63 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 1.928.921.074 (5,37 %)**

c. **Sasaran strategis 3;Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Bali yang baik sesuai SAP.**

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan *indikator outcome* Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran 2025 adalah WTP. Hal ini dicapai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada OPD untuk mengeliminir terjadinya temuan dalam rangka mempertahankan prestasi yang telah dicapai yaitu pemberian opini dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan baik reguler, khusus dan kasus. Dengan dilakukannya pembinaan dan

pemeriksaan secara rutin, diharapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset semakin tahun semakin baik dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset yang materiil dapat diminimalisir dan dihindari.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, dengan anggaran:

1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 92.116.810

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 92.116.810
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 87.814.090 (95,33 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 4.302.720 (4,67)%**

2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 159.626.210

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 159.626.210
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 158.530.410 (99,31 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 1.095.800 (0,69)%**

3) Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran Rp. 48.013.500

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 48.013.500
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 33.709.500 (70,21%)
- **Sisa Anggaran : Rp. 14.304.000 (29,79%)**

Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan karena adanya penyesuaian kebijakan dan keterbatasan waktu pelaksanaan.

4) Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran Rp. 142.605.705

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 142.605.705
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 141.706.555 (99,37 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 899.150 (0,63 %)**

5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 547.158.610

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 547.158.610
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 531.179.190 (97,08 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 16.533.031 (2,92 %)**

6) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 211.249.315

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 211.249.315
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 197.556.115 (93,52 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 2.806.182 (6,48 %)**

7) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran Rp. 141.882.800

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 141.882.800
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 138.058.072 (97,30 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 52.028.678 (2,70 %)**

8) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran Rp. 77.916.400

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 77.916.400
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 71.788.000 (92,13 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 6.128.400 (7,87 %)**

d. **Sasaran Strategis 4; Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.**

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome** Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas internal dan eksternal	100%	98,45

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan pengawas internal dan eksternal sebagian besar telah dapat ditindak lanjuti namun ada beberapa temuan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut dan segera dapat diselesaikan dengan realisasi capaian mencapai 98,45. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran **"Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan**

eksternal”, Inspektorat Daerah Provinsi Bali menetapkan program Penyelenggaraan Pengawasan dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran Rp. 489.710.480.

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025, dengan anggaran:

- Anggaran : Rp. 196.177.910
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 192.626.880 (98,19 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 3.551.030 (1,81 %)**

sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran Rp. 50.875.110

- Anggaran : Rp. 50.875.110
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 50.277.970 (98,83%)
- Sisa Anggaran : Rp. 597.140 (1,17%)

e. Sasaran strategis 5; Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Provinsi Bali	99,00	99,00

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali dengan tingkat capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Nilai Capaian Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Bali 99,00.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja nilai capaian pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2025. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan dokumen MCSP dalam pencegahan dan pengawasan korupsi di Pemerintah Provinsi Bali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI. MCSP atau Monitoring, Controlling, Surveilance for Prevention adalah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau kinerja pemerintah, program pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang meliputi 8 (delapan) area penilaian yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah (BMD), manajemen ASN, optimalisasi penerimaan daerah dan APIP. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025, sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Korupsi dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

- Anggaran : Rp. 283.068.900
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 278.190.730 (98,28 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 4.878.170 (1,72 %)**

f. Sasaran strategis 6; “Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali”

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan **indikator outcome Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali**, dengan tingkat capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali	Level III	Level III

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator *kinerja Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Prov. Bali* tahun 2025. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan Level III telah dapat dicapai dengan tingkat capaian Level III.

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran "**Terwujudnya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Bali**", dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pengawasan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025, **dengan jumlah anggaran :**

1. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

- Anggaran : Rp. 299.286.015
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 292.935.831 (97,88 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 6.350.184 (2,12 %)**

2. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Anggaran : Rp. 1.291.866.617
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 902.553.157 (69,86 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 389.313.460 (30,14 %)**

(kegiatan Bimtek yang sedianya dilaksanakan di bulan nopember s/d desember 2025 tidak dapat dilaksanakan karena peserta bimtek mengikuti orientasi dan pelatihan di Kementerian Dalam Negeri)

3. Sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

- Anggaran : Rp. 299.286.015
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 292.935.831 (97,88 %)

- **Sisa Anggaran** : **Rp. 2.661.132 (2,12%)**
- 4. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Anggaran : Rp. 24.137.200
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓
 - Realisasi Keuangan : Rp. 23.019.440 (95,37 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 1.117.760 (4,63 %)**
- 5. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Anggaran : Rp. 26.039.950.471
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓
 - Realisasi Keuangan : Rp. 25.022.376.259 (96,09 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 1.017.574.212 (3,91 %)**
- 6. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Anggaran : Rp. 49.999.400
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓
 - Realisasi Keuangan : Rp. 46.165.000 (92,33 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 9.582.700 (7,67 %)**
- 7. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Anggaran : Rp. 99.997.800
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓
 - Realisasi Keuangan : Rp. 84.115.024 (84,12 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 15.882.776 (15,88 %)**
- 8. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Anggaran : Rp. 158.109.394
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓
 - Realisasi Keuangan : Rp. 123.415.003 (78,06 %)
 - **Sisa Anggaran** : **Rp. 34.694.391 (21,94 %)**
- 9. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Anggaran : Rp. 40.070.300
 - Realisasi Fisik : 100 % ✓

- Realisasi Keuangan : Rp. 25.185.150 (62,85 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 3.624.000 (37,15 %)**

(Pencetakan dan penggandaan dilaksanakan sesuai kebutuhan riil)

10. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Anggaran : Rp. 44.140.800
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 35.956.800 (81,46 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 8.184.000 (18,54 %)**

11. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

- Anggaran : Rp. 39.960.000
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 40.436.250 (101,19 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. (476.250) (-1,19 %)**

(kelebihan pembayaran sudah disetor kembali ke kas Daerah melalui

STS No.B.09.900/263/Set/ITPROV)

12. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Anggaran : Rp. 647.514.000
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 598.311.032 (92,40 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 49.202.968 (7,60 %)**

13. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

- Anggaran : Rp. 155.155.410
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 139.041.910 (89,61 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 16.113.500 (10,39 %)**

14. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Anggaran : Rp. 5.092.900
- Realisasi Fisik : 100 % ✓

- Realisasi Keuangan : Rp. 1.970.000 (38,68 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 3.122.900 (61,32%)**

(Realisasi sesuai kebutuhan riil dikarenakan adanya budaya kerja penyelesaian tugas tanpa memanfaatkan sarana ATK yaitu melalui *Kantor Virtual*)

15. Sub kegiatan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Anggaran : Rp. 318.500.000
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 270.308.766 (84,87 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 48.191.234 (15,13 %)**

16. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Anggaran : Rp. 309.560.560
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 289.961.460 (93,67 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 19.599.100 (6,33%)**

17. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Anggaran : Rp. 1.617.453.428
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 1.560.661.140 (96,49 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 56.792.288 (3,51 %)**

18. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Anggaran : Rp. 341.752.212
- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 320.673.729 (93,83 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 21.078.483 (6,17 %)**

19. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Anggaran : Rp. 155.155.410

- Realisasi Fisik : 100 % ✓
- Realisasi Keuangan : Rp. 139.014.910 (89,61 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 16.113.500 (10,39 %)**

Dari Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar **Rp. 35.944.174.832,00** terserap sebesar **Rp. 34.015.253.758,00** atau **94,63 %**.

- Realisasi Fisik : 100 %
- Realisasi Keuangan : Rp. 139.014.910 (89,61 %)
- **Sisa Anggaran : Rp. 16.113.500 (10,39 %)**

Dari Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebesar
Rp. 35.944.174.832,00 terserap sebesar
Rp. 34.015.253.758,00 atau **94,63 %**.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2024-2026.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Perpres RI Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP maka Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah membuat laporan kinerja yang telah dicapai selama setahun.
3. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah memperoleh nilai **100 %**.
4. Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2025 adalah sebesar **Rp 35.944.174.832,00** terserap sebesar **Rp. 34.015.253.758,00** atau **92,05%**.

B. TINJAUAN KHUSUS

Meskipun Inspektorat Daerah Provinsi Bali telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan baik, namun sistem penilaian kinerja tersebut perlu terus disosialisasikan kepada unit masing-masing sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sebelumnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Namun demikian masih terdapat kekurangan terutama dalam koordinasi untuk tercapainya laporan maksimal, salah satu upaya yang

dilaksanakan dalam mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi, agar laporan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C. SARAN

Adapun hal-hal yang dapat disarankan untuk tahun–tahun yang akan datang sebagai berikut :

1. Laporan tahunan unit kerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
2. Kendala yang bersifat administratif dari beberapa kegiatan yang akselerasinya tidak sesuai dengan perencanaan awal tetap menjadi perhatian, namun demikian langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Sehingga program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan sangat efektif, efisien dan akuntabel.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap tingkatan organisasi sebagai salah satu wujud akuntabilitas kedepan diharapkan adanya pengolahan data kinerja yang mencakup penetapan data dasar (baseline data), penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data melalui data elektronik.
4. Untuk mencapai kinerja yang baik dari setiap unit kerja maka perlu adanya penegakan disiplin pegawai, membangun budaya kerja yang lebih baik serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Bali disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 4 Pebruari 2026
INSPEKTUR,

Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H
Nip. 19691010 199703 1 012





LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD
(SPJ FUNGSIONAL)
Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pengu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	6 = (4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	9 = (7+8)	s.d Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)						
5	BELANJA DAERAH	Rp25.944.174.832,00	Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.587.948.377,00	Rp1.088.073.469,00	Rp4.676.021.946,00	Rp3.871.424.502,00	Rp4.45.431.151,00	Rp4.316.856.653,00	Rp34.015.253.759,00	Rp1.929.921.074,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.051.151.092,00	Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp2.907.567.476,00	Rp1.088.073.469,00	Rp2.917.433.706,00	Rp3.871.424.502,00	Rp4.45.431.151,00	Rp4.316.856.653,00	Rp32.256.665.618,00	Rp1.794.486.474,00						
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp25.989.250.471,00	Rp23.068.987.554,00	Rp1.903.888.705,00	Rp24.972.876.259,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.972.876.259,00	Rp1.016.374.212,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.061.900.627,00	Rp24.850.000,00	Rp6.650.000,00	Rp46.500.000,00	Rp2.807.567.476,00	Rp1.088.073.469,00	Rp2.917.433.706,00	Rp3.871.424.502,00	Rp4.45.431.151,00	Rp4.316.856.653,00	Rp2.283.789.359,00	Rp778.111.262,00						
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.893.023.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp780.380.901,00	Rp678.207.239,00	Rp1.758.598.140,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.758.598.140,00	Rp134.435.800,00						
5.2.02	Belanja Modal Perlatan dan Mesin	Rp1.681.023.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp761.630.981,00	Rp792.340.200,00	Rp1.553.971.181,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.553.971.181,00	Rp127.052.559,00						
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp212.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.749.920,00	Rp185.867.039,00	Rp204.616.959,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp204.616.959,00	Rp7.383.041,00						
Inspektoral	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp35.944.174.832,00	Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.587.948.377,00	Rp1.088.073.469,00	Rp4.676.021.946,00	Rp3.871.424.502,00	Rp4.45.431.151,00	Rp4.316.856.653,00	Rp34.015.253.759,00	Rp1.929.921.074,00						
6.01.01	PROVINSI	Rp31.603.939.415,00	Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp2.426.580.520,00	Rp1.081.582.287,00	Rp3.507.367.207,00	Rp1.493.945.974,00	Rp1.368.890.813,00	Rp1.630.836.787,00	Rp30.160.580.953,00	Rp1.443.359.462,00						
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp42.659.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.348.610,00						
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp18.521.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp13.290.950,00	Rp5.230.860,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp18.521.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp13.290.950,00	Rp5.230.860,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp18.521.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp0,00	Rp13.290.950,00	Rp13.290.950,00	Rp5.230.860,00						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp13.367.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.385.750,00	Rp0,00	Rp8.385.750,00	Rp8.385.750,00	Rp4.982.050,00						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp13.367.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.385.750,00	Rp0,00	Rp8.385.750,00	Rp8.385.750,00	Rp4.982.050,00						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp948.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp0,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00	Rp198.700,00						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp258.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp201.000,00	Rp0,00	Rp201.000,00	Rp201.000,00	Rp57.900,00						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp235.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp0,00	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp85.800,00						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp11.925.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.284.750,00	Rp0,00	Rp7.284.750,00	Rp7.284.750,00	Rp4.640.250,00						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.154.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp4.905.200,00	Rp248.800,00						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.154.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp4.905.200,00	Rp248.800,00						
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.154.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp0,00	Rp4.905.200,00	Rp4.905.200,00	Rp248.800,00						
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp24.137.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp22.577.940,00	Rp1.117.760,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.137.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp22.577.940,00	Rp1.117.760,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.137.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp0,00	Rp22.577.940,00	Rp22.577.940,00	Rp1.117.760,00						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.777.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.217.940,00	Rp0,00	Rp7.217.940,00	Rp7.217.940,00	Rp1.117.760,00						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.777.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.217.940,00	Rp0,00	Rp7.217.940,00	Rp7.217.940,00	Rp1.117.760,00						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp945.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp378.900,00	Rp0,00	Rp378.900,00	Rp378.900,00	Rp286.000,00						
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp948.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp737.000,00	Rp0,00	Rp737.000,00	Rp737.000,00	Rp211.200,00						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.163.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp679.890,00	Rp0,00	Rp679.890,00	Rp679.890,00	Rp483.210,00						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji										SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GURU					Jumlah SPJ (LS + UP/GURU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)									
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)											
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp49.128.119,00	Rp39.119.828,00	Rp4.252.520,00	Rp43.372.146,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.372.146,00	Rp5.739.972,00											
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp43.831.674,00	Rp35.369.611,00	Rp3.644.670,00	Rp39.014.281,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.014.281,00	Rp4.311.363,00											
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp5.296.444,00	Rp3.750.015,00	Rp697.850,00	Rp4.357.965,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.357.965,00	Rp693.579,00											
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp18.305.882,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.305.882,00											
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp15.717.092,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.717.092,00											
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	Rp2.588.770,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.588.770,00											
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp14.628.642.040,00	Rp12.818.085.642,00	Rp1.076.531.137,00	Rp13.984.616.679,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.984.616.679,00	Rp734.023.361,00											
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp8.424.189.705,00	Rp7.459.759.090,00	Rp616.189.833,00	Rp8.074.948.923,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.074.948.923,00	Rp349.249.782,00											
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp8.390.644.549,00	Rp7.431.927.361,00	Rp612.834.181,00	Rp8.044.761.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.044.761.542,00	Rp345.688.007,00											
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Rp33.545.156,00	Rp26.831.729,00	Rp3.365.652,00	Rp30.187.381,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.365.652,00	Rp3.365.652,00											
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp1.706.196.759,00	Rp1.428.947.348,00	Rp130.837.015,00	Rp1.559.884.363,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.559.884.363,00	Rp146.512.395,00											
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp1.700.837.539,00	Rp1.424.560.885,00	Rp130.300.913,00	Rp1.554.861.598,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.554.861.598,00	Rp145.973.941,00											
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	Rp5.359.219,00	Rp4.286.863,00	Rp536.102,00	Rp4.822.765,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.822.765,00	Rp536.454,00											
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp4.498.255.577,00	Rp3.330.473.104,00	Rp329.504.299,00	Rp4.259.983.393,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.259.983.393,00	Rp239.272.184,00											
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp4.480.391.503,00	Rp3.316.190.199,00	Rp327.717.277,00	Rp4.249.907.469,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.249.907.469,00	Rp236.481.037,00											
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Rp17.864.074,00	Rp14.288.915,00	Rp17.871.012,00	Rp16.075.927,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.075.927,00	Rp1.791.147,00											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp50.700.000,00	Rp42.850.000,00	Rp6.650.000,00	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.500.000,00	Rp1.200.000,00											
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp50.700.000,00	Rp42.850.000,00	Rp6.650.000,00	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.500.000,00	Rp1.200.000,00											
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp50.700.000,00	Rp42.850.000,00	Rp6.650.000,00	Rp49.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.500.000,00	Rp1.200.000,00											
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengadaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp10.800.000,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.600.000,00	Rp1.200.000,00											
5.1.02.02.01.0002	Belanja Honorarium Penanggungjawab Penghap Keuangan	Rp38.900.000,00	Rp33.250.000,00	Rp6.650.000,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.900.000,00	Rp0,00											
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.079.791.994,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.819.100,00	Rp0,00	Rp160.819.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.819.100,00	Rp792.765.159,00											
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
5.1	BELANJA OPERASI	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp49.999.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp46.165.000,00	Rp3.834.400,00											
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Rp99.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp9.844.700,00											
5.1	BELANJA OPERASI	Rp99.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp9.844.700,00											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp99.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp9.844.700,00											
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp99.997.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp90.154.100,00	Rp9.844.700,00											
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp69.828.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.419.100,00	Rp0,00	Rp69.419.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp69.419.100,00	Rp7.994.700,00											
5.1.02.01.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp26.423.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.735.000,00	Rp0,00	Rp20.735.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.735.000,00	Rp5.689.000,00											
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.746.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.746.000,00											
6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp158.109.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp123.603.394,00											
5.1	BELANJA OPERASI	Rp158.109.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp123.603.394,00											
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp158.109.394,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.500.000,00	Rp123.603.394,00											

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GURU				Jumlah SPJ (LS + UP/GURU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)			
1																
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.684.023.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.630.981,00	Rp804.052.059,00	Rp1.685.693.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.565.693.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.565.693.040,00	Rp128.339.700,00	
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	Rp1.681.023.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp781.630.981,00	Rp792.340.200,00	Rp1.553.971.181,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.553.971.181,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.553.971.181,00	Rp127.055.659,00	
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp478.000,00	
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp478.000,00	
5.2.02.03.03.009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.025.000,00	Rp478.000,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.003.579.760,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp146.537.760,00	Rp786.901.200,00	Rp633.438.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.438.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.438.980,00	Rp70.149.780,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp66.571.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp1.571.400,00	
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp66.571.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.000.000,00	Rp1.571.400,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp937.008.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.537.760,00	Rp786.901.200,00	Rp688.438.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.438.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp688.438.980,00	Rp68.569.800,00	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp839.285.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp786.901.200,00	Rp786.901.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp786.901.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp786.901.200,00	Rp62.384.600,00	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp65.665.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.700.800,00	Rp0,00	Rp64.700.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.700.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.700.800,00	Rp64.580,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp42.067.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.836.980,00	Rp0,00	Rp28.836.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.836.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.836.980,00	Rp15.229.220,00	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	Rp98.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp198.999,00	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp98.099.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.900.001,00	Rp198.999,00	
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Perawatan Studio Audio	Rp10.539.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.001,00	Rp0,00	Rp10.500.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.001,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.500.001,00	Rp38.999,00	
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Perawatan Studio Video dan Film	Rp97.559.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp87.400.000,00	Rp159.300,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp6.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp1.111.000,00	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	Rp6.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp1.111.000,00	
5.2.02.08.01.0004	Belanja Modal Laboratorium Kesehatan	Rp6.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.439.000,00	Rp1.111.000,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp669.294.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp608.168.200,00	Rp608.168.200,00	Rp608.168.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp608.168.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp608.168.200,00	Rp65.128.780,00	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Lunik	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp43.479.900,00	
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.712.800,00	Rp43.479.900,00	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perawatan Komputer	Rp147.682.180,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.935.200,00	Rp0,00	Rp135.935.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.935.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.935.200,00	Rp11.648.980,00	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perawatan Personal Computer	Rp142.717.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.313.000,00	Rp0,00	Rp131.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.313.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp131.313.000,00	Rp11.404.880,00	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Perawatan Komputer Lainnya	Rp4.964.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.622.200,00	Rp0,00	Rp4.622.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.622.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.622.200,00	Rp242.300,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp1.279.141,00	
5.2.03.04	Belanja Modal Tugur Tik Kontro/Pasli	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp1.279.141,00	
5.2.03.04.01	Belanja Modal TugurTanda Batas	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp1.279.141,00	
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagur	Rp13.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.721.859,00	Rp1.279.141,00	
6.01.01.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urahan Pemerintahan Daerah	Rp633.153.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.606.050,00	Rp32.555.410,00	Rp279.161.460,00	Rp290.933.631,00	Rp22.145.135,00	Rp283.078.766,00	Rp692.240.226,00	Rp70.913.234,00	Rp692.240.226,00	Rp3.122.900,00	
6.01.01.108.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp6.092.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.982.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.982.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	Rp3.122.900,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.992.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.992.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.992.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.970.000,00	Rp0,00	Rp1.970.000,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	Rp1.129.900,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	
5.1.02.02.01.0084	Belanja Paket/Pengiriman	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GURU			Jumlah SPJ (LS + UP/GURU)	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	12 = (10+11)			13 = (6+9+12)
6.01.01.108.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp318.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.183.831,00	Rp22.145.135,00	Rp270.308.766,00	Rp48.191.234,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp318.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.183.831,00	Rp22.145.135,00	Rp270.308.766,00	Rp48.191.234,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp318.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.183.831,00	Rp22.145.135,00	Rp270.308.766,00	Rp48.191.234,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp318.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.183.831,00	Rp22.145.135,00	Rp270.308.766,00	Rp48.191.234,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp318.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp248.183.831,00	Rp22.145.135,00	Rp270.308.766,00	Rp48.191.234,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.644.891,00	Rp4.19.029,00	Rp5.063.960,00	Rp3.594,00,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp6.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.148.250,00	Rp6.85.700,00	Rp2.233.960,00	Rp4.268.060,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp303.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp241.370.460,00	Rp22.640.406,00	Rp263.010.866,00	Rp59.598.144,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp309.560.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.606.050,00	Rp32.555.410,00	Rp279.161.460,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp289.961.460,00	Rp19.599.100,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp309.560.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.606.050,00	Rp32.555.410,00	Rp279.161.460,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp289.961.460,00	Rp19.599.100,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp309.560.560,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.606.050,00	Rp32.555.410,00	Rp279.161.460,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp289.961.460,00	Rp19.599.100,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp97.228.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.829.000,00	Rp0,00	Rp78.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.599.100,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp97.228.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp78.829.000,00	Rp0,00	Rp78.829.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.599.100,00	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor	Rp66.773.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.522.200,00	Rp0,00	Rp56.522.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.522.200,00	Rp10.261.500,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp30.454.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.306.800,00	Rp0,00	Rp22.306.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.306.800,00	Rp8.147.600,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp212.332.460,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp167.777.060,00	Rp32.555.410,00	Rp200.332.460,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp1.209.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp196.793.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.828.050,00	Rp29.965.610,00	Rp184.793.660,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp10.800.000,00	Rp1.209.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp184.793.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.828.050,00	Rp29.965.610,00	Rp184.793.660,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp184.793.660,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.209.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Akurasi	Rp15.538.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.949.000,00	Rp2.599.800,00	Rp15.538.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.538.800,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp7.915.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.596.290,00	Rp1.319.260,00	Rp7.915.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.915.500,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp431.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp359.600,00	Rp71.920,00	Rp431.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp431.620,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp659.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp449.500,00	Rp199.900,00	Rp659.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp659.400,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp6.662.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.543.660,00	Rp1.108.730,00	Rp6.662.980,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.662.980,00	Rp0,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.114.361.050,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.256.749.389,00	Rp244.944.918,00	Rp1.501.694.307,00	Rp505.160.712,00	Rp153.531.760,00	Rp518.682.472,00	Rp2.020.376.779,00	Rp99.984.271,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dines Operasional atau Lapangan	Rp1.617.453.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.107.853.690,00	Rp67.589.738,00	Rp1.175.453.428,00	Rp394.436.412,00	Rp77.300,00	Rp385.207.712,00	Rp1.560.961.140,00	Rp56.792.288,00	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.617.453.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.107.853.690,00	Rp67.589.738,00	Rp1.175.453.428,00	Rp394.436.412,00	Rp77.300,00	Rp385.207.712,00	Rp1.560.961.140,00	Rp56.792.288,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.617.453.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.107.853.690,00	Rp67.589.738,00	Rp1.175.453.428,00	Rp394.436.412,00	Rp77.300,00	Rp385.207.712,00	Rp1.560.961.140,00	Rp56.792.288,00	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp767.855.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp457.598.428,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp338.988.690,00	Rp67.589.738,00	Rp407.598.428,00	Rp25.471.800,00	Rp77.300,00	Rp28.243.100,00	Rp443.941.528,00	Rp23.759.900,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp429.628.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp316.690.490,00	Rp62.598.098,00	Rp379.628.588,00	Rp25.471.800,00	Rp77.300,00	Rp28.243.100,00	Rp443.941.528,00	Rp23.759.900,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp10.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.986.630,00	Rp110.876.366,00	Rp10.876.196,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.876.196,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp221.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp185.793.660,00	Rp25.958.732,00	Rp221.752.392,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp221.752.392,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembiayaan Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.471.800,00	Rp77.300,00	Rp28.243.100,00	Rp25.79.900,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UPP/GUTU				
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	6=(4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	9=(7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	12=(10+11)	Jumlah SPJ (LS + UPP/GUTU)	s.d. Bulan Ini	Sisa Ragu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+8+12)	14=(13+13)				
6.01.03.1.01	Perencanaan	Rp1.591.152.532.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp749.213.050.00	Rp68.511.082.00	Rp756.724.132.00	Rp369.901.060.00	Rp70.863.796.00	Rp241.1.102.716.00	Rp1.196.488.988.00	Rp395.668.644.00				
6.01.03.1.01.0001	Perencanaan Kegiatan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp299.286.015.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp210.798.920.00	Rp303.796.00	Rp241.1.102.716.00	Rp292.935.831.00	Rp38.359.184.00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp299.286.015.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp210.798.920.00	Rp303.796.00	Rp241.1.102.716.00	Rp292.935.831.00	Rp38.359.184.00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp299.286.015.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp210.798.920.00	Rp303.796.00	Rp241.1.102.716.00	Rp292.935.831.00	Rp38.359.184.00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp242.752.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.558.920.00	Rp14.793.796.00	Rp39.352.716.00	Rp39.352.716.00	Rp3.400.184.00	Rp58.900.00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.752.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.752.900.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.752.900.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp9.298.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.298.500.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp9.298.500.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp8.206.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.206.400.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.206.400.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.388.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.388.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp2.388.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0028	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp24.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp24.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp59.733.115.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp0.00	Rp51.833.115.00	Rp13.907.250.00	Rp4.950.000.00	Rp4.950.000.00	Rp66.793.115.00	Rp2.999.000.00				
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp55.948.415.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp4.950.000.00	Rp4.950.000.00	Rp2.999.000.00	Rp2.999.000.00				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp7.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp7.900.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pemahalan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp47.948.415.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp3.884.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.884.700.00	Rp0.00	Rp3.884.700.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3.884.700.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Kesurusi	Rp1.979.875.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.979.875.00	Rp0.00	Rp1.979.875.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.979.875.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.020.020.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.020.020.00	Rp0.00	Rp1.020.020.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.020.020.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp953.855.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp953.855.00	Rp0.00	Rp953.855.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp953.855.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0008	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp107.880.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp107.880.00	Rp0.00	Rp107.880.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp107.880.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp134.850.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp134.850.00	Rp0.00	Rp134.850.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp134.850.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0010	Belanja Luran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.663.095.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.663.095.00	Rp0.00	Rp1.663.095.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.663.095.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196.800.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
6.01.03.1.01.0002	Perencanaan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.291.866.617.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp25.095.600.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.805.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.805.600.00	Rp0.00	Rp8.805.600.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.805.600.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp16.290.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp16.290.000.00	Rp0.00	Rp16.290.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp16.290.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.173.155.017.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.173.155.017.00	Rp0.00	Rp1.173.155.017.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1.173.155.017.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp131.072.757.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp131.072.757.00	Rp0.00	Rp131.072.757.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp131.072.757.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pemahalan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp14.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.200.000.00	Rp0.00	Rp14.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14.200.000.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp116.872.757.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp116.872.757.00	Rp0.00	Rp116.872.757.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp116.872.757.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Akurasi	Rp8.582.280.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.582.280.00	Rp0.00	Rp8.582.280.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp8.582.280.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp4.881.225.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.881.225.00	Rp0.00	Rp4.881.225.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp4.881.225.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	Rp266.104.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp266.104.00	Rp0.00	Rp266.104.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp266.104.00	Rp0.00	Rp0.00				
5.1.02.02.02.0007	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp332.630.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp332.630.00	Rp0.00	Rp332.630.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp332.630.00	Rp0.00	Rp0.00				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU)	Sisa Rebu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Ini	s.d Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)						
5.1.02.02.02.00.10	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp4.102.301,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.880.555,00	Rp221.746,00	Rp4.102.301,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.102.301,00	Rp0,00						
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp1.032.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.436.000,00	Rp0,00	Rp577.436.000,00	Rp78.344.000,00	Rp27.120.000,00	Rp105.464.000,00	Rp682.900.000,00	Rp349.800.000,00						
5.1.02.02.12.00.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp1.032.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp577.436.000,00	Rp0,00	Rp577.436.000,00	Rp78.344.000,00	Rp27.120.000,00	Rp105.464.000,00	Rp682.900.000,00	Rp349.800.000,00						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp993.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.550.540,00	Rp13.440.000,00	Rp90.990.540,00	Rp90.990.540,00	Rp2.523.360,00						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp993.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.550.540,00	Rp13.440.000,00	Rp90.990.540,00	Rp90.990.540,00	Rp2.523.360,00						
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp993.618.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp77.550.540,00	Rp13.440.000,00	Rp90.990.540,00	Rp90.990.540,00	Rp2.523.360,00						
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Rp74.117.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp442.021.788,00	Rp78.228.192,00	Rp520.250.980,00	Rp686.592.917,00	Rp28.524.498,00						
6.01.03.1.02.00.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp211.249.315,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp442.021.788,00	Rp78.228.192,00	Rp520.250.980,00	Rp686.592.917,00	Rp28.524.498,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp211.249.315,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp442.021.788,00	Rp78.228.192,00	Rp520.250.980,00	Rp686.592.917,00	Rp28.524.498,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp211.249.315,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp0,00	Rp165.341.937,00	Rp442.021.788,00	Rp78.228.192,00	Rp520.250.980,00	Rp686.592.917,00	Rp28.524.498,00						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp99.236.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp5.599.200,00						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp99.236.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp3.643.000,00	Rp5.599.200,00						
5.1.02.01.01.00.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.054.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.698.200,00						
5.1.02.01.01.00.025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.133.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.800,00						
5.1.02.01.01.00.027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp157.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.000,00						
5.1.02.01.01.00.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.550,00	Rp3.941.050,00	Rp3.941.050,00	Rp3.941.050,00	Rp638.950,00						
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp65.048.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.100.000,00						
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp65.048.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.100.000,00						
5.1.02.02.01.00.003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.100.000,00						
5.1.02.02.01.00.028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp47.948.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.948.415,00	Rp0,00	Rp47.948.415,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp47.948.415,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp3.884.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.884.700,00	Rp0,00	Rp3.884.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.884.700,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02.00.005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp1.978.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.978.875,00	Rp0,00	Rp1.978.875,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.978.875,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02.00.006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp107.880,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp107.880,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02.00.007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp154.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.850,00	Rp0,00	Rp154.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp154.850,00	Rp0,00						
5.1.02.02.02.00.010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	Rp1.663.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.663.095,00	Rp0,00	Rp1.663.095,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.663.095,00	Rp0,00						
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp142.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.440.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp0,00						
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp142.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.440.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp0,00						
5.1.02.04.01.00.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp142.080.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.440.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp142.080.000,00	Rp0,00						
6.01.03.1.02.00.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp141.882.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp18.128.750,00	Rp20.950.500,00	Rp38.979.250,00	Rp138.058.072,00	Rp3.824.728,00						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp141.882.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp18.128.750,00	Rp20.950.500,00	Rp38.979.250,00	Rp138.058.072,00	Rp3.824.728,00						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp141.882.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp18.128.750,00	Rp20.950.500,00	Rp38.979.250,00	Rp138.058.072,00	Rp3.824.728,00						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp99.242.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.248.750,00	Rp3.090.500,00	Rp6.339.250,00	Rp6.339.250,00	Rp2.908.550,00						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp99.242.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.248.750,00	Rp3.090.500,00	Rp6.339.250,00	Rp6.339.250,00	Rp2.908.550,00						
5.1.02.01.01.00.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp232.800,00						
5.1.02.01.01.00.025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp1.133.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.000,00						
5.1.02.01.01.00.027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp157.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.000,00						
5.1.02.01.01.00.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp750.550,00	Rp3.941.050,00	Rp3.941.050,00	Rp3.941.050,00	Rp638.950,00						
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp821.179,00						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU)		Sisa Ragu Anggaran
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	6 = (4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	9 = (7+8)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3+13)				
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (8+9+12)	14 = (3+13)							
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konstruksi Non Konstruksi	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00							
5.1.02.02.09.00.11	Belanja Jasa Konstruksi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Rp100.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.078.822,00	Rp0,00							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp32.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
6.01.03.1.02.00.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencapaian dan Pembuktian Kinerja	Rp293.088.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1	BELAJA OPERASI	Rp293.088.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp293.088.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp55.548.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp55.548.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp7.385.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.206.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.28	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp456.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.62	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp46.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp227.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp227.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp227.520.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
6.01.03.1.02.00.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	Rp77.916.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1	BELAJA OPERASI	Rp77.916.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp77.916.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp25.136.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp25.136.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp17.163.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.043.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.01.01.00.52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp6.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.02.01.00.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp8.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp43.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp43.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
5.1.02.04.01.00.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp43.680.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
JUMLAH		Rp35.944.174.832,00	Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.587.948.377,00	Rp1.088.073.469,00	Rp4.676.021.346,00	Rp3.871.424.502,00	Rp445.443.151,00	Rp4.316.865.653,00	Rp34.015.253.738,00	Rp1.928.921.074,00							
Penerimaan :																				
- SP2D-																				
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00							
LS			Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.587.948.377,00	Rp1.088.073.469,00	Rp4.676.021.346,00	Rp3.871.424.502,00	Rp445.443.151,00	Rp4.316.865.653,00	Rp34.015.253.738,00	Rp1.928.921.074,00							


Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS + UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp443.589.295,00	Rp48.595.128,00	Rp490.189.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.189.423,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp246.054,00	Rp0,00	Rp246.054,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.054,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp195.764,00	Rp0,00	Rp195.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.764,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp738.116,00	Rp0,00	Rp738.116,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp738.116,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp687.267,00	Rp0,00	Rp687.267,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp687.267,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp519.515.892,00	Rp64.267.727,00	Rp583.783.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.783.619,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp583.783.619,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp12.598.151,00	Rp1.417.527,00	Rp14.015.678,00	Rp2.114.448,00	Rp215.760,00	Rp2.330.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.330.208,00	Rp16.345.886,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp37.794.243,00	Rp4.252.520,00	Rp42.046.763,00	Rp2.598.110,00	Rp289.700,00	Rp2.887.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.887.810,00	Rp44.914.573,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp124.443.735,00	Rp13.566.961,00	Rp138.010.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.010.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.010.696,00	Rp138.010.696,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Penunahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Tapeum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Tapean			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Baras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp1.139.802.507,00	Rp120.069.863,00	Rp1.259.872.370,00	Rp76.140.120,00	Rp7.789.400,00	Rp83.921.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp83.921.520,00	Rp1.555.195.586,95	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.564.806,00	Rp98.723.103,00	Rp213.287.909,00	Rp32.338.469,40	Rp1.579.777,00	Rp33.918.246,40	Rp247.206.156,40	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Pa 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.769.040,00	Rp12.891.679,00	Rp26.660.719,00	Rp4.013.424,55	Rp75.180,00	Rp4.088.604,55	Rp30.759.323,55	Rp0,00
3. PPh 21			Rp1.800.735.405,00	Rp17.707.524,00	Rp1.818.442.929,00	Rp6.737.943,00	Rp285.110,00	Rp6.003.053,00	Rp1.285.500,00	Rp7.425.500,00	Rp2.028.000,00	Rp1.829.473.982,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Pa 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.846.295,00	Rp400.778,00	Rp3.247.073,00	Rp5.528.542,00	Rp245.863,00	Rp5.774.405,00	Rp9.021.476,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Pa 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Pa 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Pa 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.807,00	Rp0,00	Rp295.807,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.807,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Pa Pa 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp1.800.735.405,00	Rp17.707.524,00	Rp1.818.442.929,00	Rp137.213.691,00	Rp1.280.670,00	Rp3.543.881,00	Rp43.165.935,95	Rp2.643.320,00	Rp45.809.255,95	Rp2.113.746.546,95	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.539.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.994.948.377,00	Rp1.083.073.469,00	Rp4.833.021.546,00	Rp3.872.087.111,00	Rp935.045.246,00	Rp4.807.132.357,00	Rp24.212.530.462,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPRG/UTU			Jumlah SPJ (LS + UPRG/UTU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini 6 = (4+5)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini 9 = (7+8)	s.d Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d Bulan Ini 12 = (10+11)			13 = (6+9+12)
-SPJ-														
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.594.948.377,00	Rp1.098.073.469,00	Rp4.693.021.846,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.705.398.105,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU-KKPP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.842.580,00	Rp2.842.580,00	Rp0,00	Rp0,00
-Potongan:														
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp443.589.295,00	Rp46.585.128,00	Rp490.168.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp490.168.423,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PNS			Rp246.094,00	Rp0,00	Rp246.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp246.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK			Rp195.764,00	Rp0,00	Rp195.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.764,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp738.116,00	Rp0,00	Rp738.116,00	Rp4.950,00	Rp0,00	Rp4.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp793.066,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Biaya Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp587.287,00	Rp0,00	Rp587.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp587.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp519.615.882,00	Rp54.287.727,00	Rp573.883.609,00	Rp38.785.950,00	Rp0,00	Rp38.785.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp612.669.559,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan Kerja			Rp12.598.151,00	Rp1.417.527,00	Rp14.015.678,00	Rp2.114.448,00	Rp21.5.780,00	Rp2.330.208,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.345.886,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kesehatan			Rp37.794.243,00	Rp4.252.520,00	Rp42.046.763,00	Rp2.598.110,00	Rp289.700,00	Rp2.887.810,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.914.573,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp124.448.735,00	Rp13.566.961,00	Rp138.010.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp138.010.696,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabungan Penukaran Pakyul PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Biaya Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Tapeum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Tapeum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Batare (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp32.886.882,00	Rp3.308.190,00	Rp35.922.852,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.922.852,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp1.139.802.507,00	Rp120.088.883,00	Rp1.259.892.370,00	Rp78.140.120,00	Rp7.789.400,00	Rp83.909.520,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.556.195.988,95	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
-Pajak:														
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp114.564.866,00	Rp98.723.103,00	Rp213.287.969,00	Rp32.338.469,40	Rp1.579.777,00	Rp33.913.246,40	Rp247.206.155,40	Rp0,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.789.040,00	Rp12.891.679,00	Rp28.680.719,00	Rp4.013.424,55	Rp75.180,00	Rp4.088.604,55	Rp30.749.323,55	Rp0,00	Rp0,00
3. PPh 21			Rp1.800.735.405,00	Rp17.707.524,00	Rp1.818.442.929,00	Rp5.737.943,00	Rp285.118,00	Rp6.003.063,00	Rp1.285.500,00	Rp2.028.000,00	Rp1.828.473.982,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
4. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Biaya Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.846.285,00	Rp400.779,00	Rp3.247.073,00	Rp5.528.542,00	Rp245.883,00	Rp5.774.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.607,00	Rp0,00	Rp295.607,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp295.607,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU)	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1		3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3+13)						
10. Pajak Penghasilan Pa-Pa 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00				
Total Pajak			Rp1.800.735.405,00	Rp1.177.707.524,00	Rp1.818.442.929,00	Rp1.57.213.691,00	Rp112.280.670,00	Rp249.494.361,00	Rp43.165.935,95	Rp2.643.320,00	Rp45.809.255,95	Rp2.113.746.545,95	Rp0,00						
- SPJ (Neto):																			
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
LS			Rp20.171.299.642,00	Rp1.772.741.318,00	Rp21.944.040.960,00	Rp3.381.594.566,00	Rp968.023.389,00	Rp4.349.617.965,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.942.560,00	Rp2.942.560,00	Rp190.276.704,00	Rp190.276.704,00	Rp197.276.704,00	Rp0,00			
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
JUMLAH PENGELUARAN			Rp23.111.837.554,00	Rp1.910.538.705,00	Rp25.022.376.259,00	Rp3.594.948.377,00	Rp1.088.073.469,00	Rp4.683.021.846,00	Rp3.871.424.502,00	Rp45.809.255,95	Rp4.316.855.653,00	Rp34.022.253.756,00	Rp0,00						
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00			

Mengyetujui,

 Muryan Surodjo, S.H., M.H.
 NIP. 056712311986031175
 INSPEKTORAT DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI ANGGRARAN

Disiapkan oleh,

 Lili Ketut Marwati
 NIP. 196712311987032034
 BENDAHARA PENGELUARAN